

Implementasi Kebijakan Pemenuhan Ketersediaan Bahan Baku Industri Perikanan di Wilayah Pesisir Pulau Jawa

Erna^{1*)}

¹Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
Jl. Perjuangan No. 17 By Pass Cirebon, Indonesia, Jawa Barat Indonesia

^{*)}Email: erna.untag1945@gmail.com

ABSTRAK

Perairan Laut Jawa merupakan wilayah aktivitas perikanan tangkap terpenting di wilayah pesisir Jawa ditinjau dari jumlah armada penangkapan, jumlah nelayan, jumlah industri perikanan serta potensi pasar berikut prasarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan ketersediaan bahan baku guna memenuhi pasokan ikan khususnya industri pengolahan. Metode penelitian ini menggunakan cluster analysis. Data yang diambil meliputi data sekunder dan primer. Hasil penelitian diperoleh bahwa kebijakan pemenuhan ketersediaan bahan baku ikan dapat dilakukan dengan pengelompokan pelabuhan perikanan berdasarkan aspek operasional dan distribusi di wilayah pesisir Jawa. Secara geografis pengelompokan pelabuhan perikanan di wilayah pesisir Jawa dapat terbagi menjadi 3 bagian yaitu bagian barat, tengah dan timur. Pengelompokan tersebut didasarkan pada tingkat kemiripan aktivitas pelabuhan perikanan. Implementasi kebijakan sistem konektivitas pelabuhan perikanan pada hakikatnya berimplikasi dengan sistem logistik perikanan. Terbentuknya sistem logistik perikanan secara terpadu diharapkan dapat mengatasi permasalahan kekurangan bahan baku industri perikanan, kelebihan pasokan dan penurunan mutu hasil tangkapan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Industri Perikanan, Pelabuhan Perikanan, Pesisir Jawa

ABSTRACT

The waters of the Java Sea are the most important capture fisheries activity areas in the coastal areas of Java in terms of the number of fishing fleets, the number of fishermen, the number of fishing industries as well as market potential and infrastructure. This study aims to describe the implementation of the policy on the availability of raw materials to meet the fish supply, especially the processing industry. This research method uses cluster analysis. The data taken include secondary and primary data. The results obtained that the policy of fulfilling the availability of fish raw materials can be done by grouping fishing ports based on operational and distribution aspects in the coastal areas of Java. Geographically, the grouping of fishing ports in the coastal areas of Java can be divided into 3 parts, namely the western, central and eastern parts. The grouping is based on the similarity level of fishing port activities. The implementation of the fisheries port connectivity system policy essentially has implications for the fisheries logistics system. The establishment of an integrated fishery logistics system is expected to overcome the problems of shortage of raw materials for the fishing industry, oversupply and decline in the quality of catches.

Keywords: Policy Implementation, Fishery Industry, Fishing Port, Coastal Java

PENDAHULUAN

Pelabuhan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Peraturan Menteri KP Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan juga bahwa pelabuhan perikanan mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa pelayanan pengolahan hasil perikanan sekaligus mempunyai tanggung jawab untuk dapat menjamin keberlangsungan suplai bahan baku bagi pelaku industri kepelabuhan perikanan (IKP). Salah satu kegiatan industri yang berhubungan dengan perikanan dan dilakukan di dalam pelabuhan perikanan adalah industri pengolahan ikan.

Saat ini pemerintah mulai mendorong munculnya aktivitas kepelabuhanan dengan mengeluarkan kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.27 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan mengamanatkan bahwa integrasi sistem produksi hulu dan hilir ditujukan untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian wilayah sekitarnya.

Kawasan industrialisasi perikanan telah tersebar di beberapa pelabuhan perikanan khususnya di pantura Jawa. Hal ini karena perairan Laut Jawa merupakan wilayah aktivitas perikanan tangkap terpenting di Pantura Jawa ditinjau dari jumlah armada penangkapan, jumlah nelayan, jumlah industri pengolahan

perikanan serta potensi pasar berikut prasarannya. Namun demikian jumlah dan aktivitas pelabuhan perikanan di Pantura Jawa, belum mencerminkan gambaran perkembangan kemajuan aktivitas perikanan tangkapnya secara kualitatif dan nyata. Lubis et al. (2005) menyatakan bahwa hal itu dikarenakan oleh dua hal yaitu lemahnya fasilitas kepelabuhanan perikanan dan kelemahan dalam pengelolaan dan pengorganisasian kepelabuhanan perikanan. Disamping itu permasalahan ketersediaan pasokan ikan menjadi hal utama khususnya bagi pihak yang memasarkan tujuan ekspor produk perikanan. Untuk itu penerapan jejaring antar pelabuhan perikanan guna menjamin ketersediaan pasokan ikan terkait dengan pemasaran baik lokal maupun ekspor menjadi penting. (Gumilang, AP, 2021). Sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan pengelompokan pelabuhan perikanan khususnya di Pantura Jawa perlu digunakan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi pelabuhan perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan ketersediaan bahan baku guna memenuhi pasokan ikan khususnya industri pengolahan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan *cluster analysis* Analisis cluster merupakan teknik multivariat yang memiliki tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Pengelompokan pelabuhan berdasarkan indikator aktivitas operasional dan distribusi pada pelabuhan perikanan di pesisir Jawa. Data yang diambil meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan di pelabuhan. Data sekunder diperoleh dari beberapa instansi terkait antara lain pihak Pelabuhan Perikanan dan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengklasteran dikelompokkan berdasarkan aktivitas

pelabuhan perikanan yang dibagi menjadi variabel operasional berjumlah 30 variabel dan variabel distribusi hasil perikanan berjumlah 3 variabel. Variabel operasional mencakup produksi ikan yang didaratkan, perbekalan, ketersediaan sarana pelabuhan, ukuran fasilitas dan frekuensi kapal perikanan yang mendaratkan.

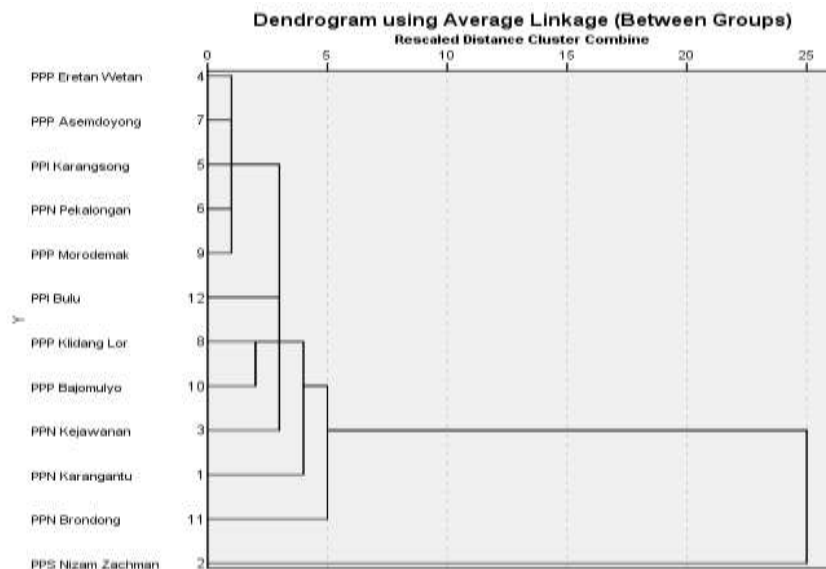
Variabel distribusi hasil perikanan meliputi distribusi lokal, luar Jawa, dan ekspor. Menurut Supranto J (2004) langkah pengklasteran dalam analisis kluster metode hierarki mencakup tiga hal yaitu: Pertama, mengukur kesamaan jarak. Hal yang penting dalam penggerombolan adalah bagaimana mengkuantifikasi ukuran kemiripan antar objek. Kedua, membentuk kluster secara hierarki. Metode ini menggunakan aglomerasi. Dalam metode aglomerasi tiap observasi pada mulanya dianggap sebagai cluster tersendiri sehingga terdapat cluster sebanyak jumlah observasi. Kemudian dua cluster yang terdekat kesamaannya digabung menjadi suatu cluster baru, sehingga jumlah cluster berkurang satu pada tiap tahap. Ketiga, melakukan interpretasi terhadap kluster

terbentuk. Tahap akhir dari analisis kluster adalah menginterpretasikan dari kluster-kluster yang terbentuk.

Data dianalisis menggunakan analisis kluster metode hierarki dengan diagram pohon dendrogram untuk mengelompokkan pelabuhan perikanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas operasional pelabuhan perikanan dalam analisis kluster hierarki meliputi produksi ikan yang didaratkan, perbekalan, ketersediaan sarana pelabuhan, ukuran fasilitas dan frekuensi kapal perikanan yang mendaratkan hasil tangkapan. Sedangkan aktivitas distribusi hasil perikanan dalam analisis kluster meliputi distribusi lokal, regional, luar Jawa, dan ekspor. Hasil analisis kluster menggunakan dendrogram menunjukkan terdapat 3 kelompok pelabuhan perikanan berdasarkan aktivitas operasional pelabuhan dan aktivitas distribusinya. Sebagaimana pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1 Dendrogram dengan metode average linkage

Berdasarkan dendrogram di atas, tampak bahwa pelabuhan perikanan nomor 4, 7, 5, 6, dan 9 membentuk kluster terlebih dahulu. Setelah itu pelabuhan perikanan

nomor 12, 8, 10, 3, 1 dan 11 membentuk kluster. Kemudian pelabuhan perikanan nomor 2 membentuk kluster baru.

Dengan demikian pelabuhan perikanan dikelompokkan menjadi 3 klaster sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1. Kelompok pelabuhan perikanan di Pesisir Jawa berdasarkan aktivitas

Klaster 1	Klaster 2	Klaster 3
PPN Pekalongan	PPN Brondong	PPS Nizam Zachman Jakarta
PPP Morodemak	PPN Kejawanan	
PPP Asemtoyong	PPN Karangantu	
PPP Eretan Wetan	PPP Bajomulyo	
PPI Karangsong	PPP Klidang Lor	
	PPI Bulu	

Sumber: Hasil dendogram analisis cluster

Tabel 1 menunjukkan terdapat tiga kelompok pelabuhan perikanan di wilayah Pesisir Jawa yaitu kelompok satu meliputi PPN Pekalongan, PPP Morodemak, PPP Asem Doyong, PPP Eretan Wetan, dan PPI Karangsong. Kelompok dua adalah PPN Brondong, PPI Bulu, PPP Klidang Lor, PPP Bajomulyo, PPN Kejawanan dan PPN Karangantu, sedangkan kelompok tiga adalah PPS Nizam Zachman Jakarta. Dengan demikian di dalam pengelolaan pelabuhan perikanan khususnya terkait distribusi pemasaran dalam pemenuhan bahan baku industri perikanan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Pengelompokan tersebut didasarkan pada tingkat kemiripan antar pelabuhan perikanan berdasarkan aktivitas pelabuhan perikanan.

Tujuan dilakukan pengelompokan ini adalah untuk mempermudah proses segmentasi pasar distribusi ikan yang mengelompokkan pasar heterogen menjadi pasar homogeny. Pada tabel 1 juga terdapat perbedaan aktivitas pelabuhan dalam tiga kelompok. PPS Nizam Zachman Jakarta di klaster tiga menjadi satu-satunya anggota klaster sekaligus sebagai pemimpin dari klaster tersebut sehingga memiliki strategi pengelolaan yang paling berbeda dengan pelabuhan-pelabuhan perikanan lainnya, hal ini karena dilihat dari produksi ikan, fasilitas pelabuhan dan distribusi pemasaran perikanan, PPS Nizam

Zachman Jakarta memiliki nilai lebih tinggi dibanding dengan pelabuhan lainnya di wilayah Pantura Jawa.

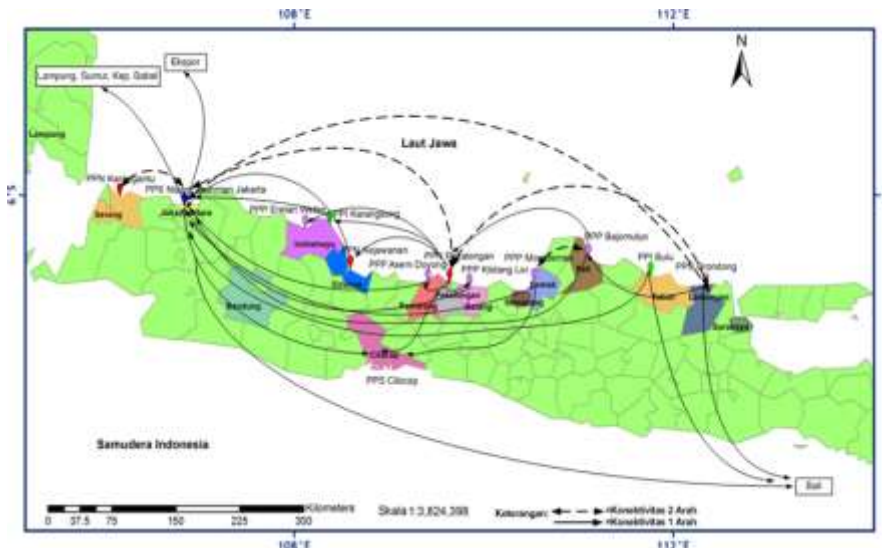
Dari sisi distribusi pemasaran ikan misalnya PPS Nizam Zachman Jakarta merupakan pelabuhan yang paling besar nilainya yakni 80%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PPS Nizam Zachman Jakarta menguasai pangsa pasar komoditas perikanan di sepanjang wilayah Pesisir Jawa untuk pemenuhan komoditas perikanan.

Produk ikan tersebut dapat diterima atau terdistribusi oleh semua segmen di Pesisir Jawa yang mencakup wilayah Pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Disamping itu komoditas ikan juga terdistribusi ke wilayah lain di luar Jawa antara lain wilayah Sumatera, Bali, dan Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan sampai ke tujuan pemasaran negara lain (ekspor) seperti Jepang, Jerman, USA, Taiwan, Bangkok, dan RRC.

Adapun klaster satu yang terdiri dari lima pelabuhan perikanan, PPN Pekalongan sebagai pemimpin dari klaster tersebut, sementara pelabuhan perikanan lain menjadi mitra atau pendukung. Hal ini karena berdasarkan pada kemampuan produksi dan distribusi perikanan yang tinggi yakni sebesar 4% dan 2% dibanding anggota pelabuhan lainnya dalam klaster satu. Sedangkan pada klaster dua yang terdiri dari enam pelabuhan perikanan,

PPN Brondong menjadi pemimpin, sementara pelabuhan perikanan lain menjadi pendukung. Hal ini karena memiliki kemampuan produksi yang besar dari pelabuhan lainnya dari klaster tersebut yakni 20% dan distribusi perikanan 18%. Berdasarkan hasil analisis, PPS Nizam Zachman menjadi pelabuhan perikanan internasional dalam suatu sistem konektivitas pelabuhan perikanan di pesisir

Jawa. Gambaran implementasi kebijakan sistem konektivitas distribusi ikan untuk pemenuhan bahan baku industri perikanan di Pesisir Jawa dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Gambaran implementasi kebijakan sistem distribusi ikan di Pesisir Jawa

Gambar 2 menjelaskan adanya sistem interaksi dalam distribusi perikanan berdasarkan pengelompokan pelabuhan. Masing-masing pelabuhan perikanan memerlukan sinergi dalam pendistribusian bahan baku hasil tangkapan ikan. Sinergi pelabuhan perikanan antara pelabuhan sebagai pengumpan dan pengumpul diperlukan dalam mendistribusikan hasil tangkapan ikan terutama dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan perikanan.

Pelabuhan perikanan memiliki interaksi dalam distribusi perikanan hingga akhirnya komoditas perikanan dapat dipasarkan ke pasar luar negeri melalui pelabuhan perikanan utama. Dalam hal ini PPS Nizam Zachman Jakarta menjadi pelabuhan utama atau pelabuhan internasional karena berinteraksi dengan pelabuhan luar negeri dalam aspek pemasaran produk hasil tangkapan yang berasal dari pelabuhan perikanan pada

kelompok 1 dan 2. Masing-masing pelabuhan memiliki peran yang sinergi dalam melengkapi ketersediaan pasokan komoditas hasil tangkapan ikan khususnya dalam memenuhi bahan baku ikan hasil laut pada industri perikanan.

Secara geografis pengelompokan pelabuhan perikanan di pesisir Jawa dapat terbagi menjadi 3 bagian yaitu bagian barat, tengah dan timur. Pelabuhan perikanan bagian barat meliputi PPS Nizam Zachman Jakarta, PPN Karangantu, PPP Eretan Wetan, PPI Karangsong, PPN Kejawanan. Pelabuhan perikanan bagian tengah meliputi PPN Pekalongan, PPP Asemtoyong, PPP Klidang lor, PPP Morodemak dan PPP Bajomulyo. Sedangkan pelabuhan perikanan bagian timur meliputi PPI Bulu dan PPN Brondong. Sehubungan hal tersebut maka peningkatan konektivitas wilayah timur dan barat di wilayah Pantura Jawa sangat diperlukan guna menjamin pasokan ikan

baik untuk pasar konsumsi maupun industri dengan harga yang kompetitif.

Implementasi kebijakan konektivitas pelabuhan perikanan berimplikasi pada sistem logistik perikanan sehingga perlu dikembangkan di wilayah Pantura Jawa. Perhatian terhadap sistem logistik perikanan harus ditingkatkan, karena peningkatan produksi perikanan akan mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat jika diikuti dengan sistem logistik yang baik (Mai et al. 2010). Lebih lanjut potensi perikanan yang besar jika dikelola dengan baik dapat dijadikan penopang ketahanan pangan yang efektif (Srinivasan 2010).

Sistem logistik perikanan merupakan sistem penyelenggaraan dari aspek produksi hingga distribusi sebagai suatu proses yang terintegrasi dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau efisiensi dan efektivitas aliran dan penyimpanan ikan, finansial dan dokumen (informasi) dari titik asal (hulu) menuju titik tujuan (hilir) untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

Sistem logistik ikan tidak hanya terbatas pada bagaimana menyediakan fasilitas fisik seperti cold storage, namun terkait dengan seluruh aspek dari produksi hingga distribusi seperti penentuan persediaan, dan transportasi (KKP 2013). Sistem logistik perikanan di Pantura Jawa merupakan upaya merealisasikan pasokan ikan hasil laut secara berkelanjutan, menghadapi kendala mendasar yakni faktor musim dan karakteristik komoditas ikan yang mudah rusak (*perishable*).

Mengingat kegiatan penangkapan ikan di laut oleh nelayan sangat dipengaruhi oleh musim. Pada waktu atau musim panen, produksi ikan tangkap bisa berlimpah, namun pada musim paceklik atau ombak besar, sebagian besar nelayan tidak dapat melaut sehingga mengakibatkan produksi perikanan tangkap pada musim tersebut berkurang. Sementara di sisi masyarakat dan industri, pasokan ikan harus tersedia sepanjang waktu tanpa mengenal musim (KKP 2013).

Dengan demikian implementasi kebijakan sistem jaringan logistik perikanan perlu dikembangkan secara komprehensif di wilayah Pesisir Jawa agar memperlancar aliran hasil tangkapan antar pelabuhan perikanan dan sentra penangkapan ikan. Hal ini akan berimplikasi diantaranya menurunnya biaya transportasi hasil tangkapan, terjaganya mutu hasil tangkapan, ketersediaan bahan baku industri, peningkatan harga jual ikan hasil tangkapan, peningkatan pendapatan nelayan dan para pelaku perikanan lainnya serta dapat diatasinya berbagai kendala perdagangan internasional.

Sistem jaringan logistik hasil tangkapan akan memberikan dampak bagi pengembangan pasar dan industri perikanan tangkap terpadu yang merupakan salah satu alternatif pembangunan ekonomi di wilayah Pesisir Jawa. Implementasi kebijakan sistem logistik perikanan yang bertumpu pada Pelabuhan Perikanan di Pesisir Jawa diharapkan akan terjadi integrasi dermaga, TPI, stasiun BBM, pabrik es, sarana pembekuan, gudang penyimpanan dingin, serta sarana transportasi dan distribusi hasil perikanan.

Salah satu upaya penting menggairahkan sektor perikanan laut di Pesisir Jawa adalah membangun basis industri perikanan hasil laut berikut mata rantainya, mulai dari bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi dalam suatu usaha perikanan yang terintegrasi (hulu sampai hilir) dengan implementasi kebijakan penguatan sistem logistik ikan dan sistem rantai dingin terpadu. Dengan demikian infrastruktur di daerah-daerah di pesisir Jawa harus diperkuat, sehingga semakin terbuka akses nelayan ke air bersih, listrik, bahan bakar, dan pasar. Kebijakan peningkatan konektivitas wilayah timur dan barat khususnya di wilayah Pesisir Jawa diperlukan untuk menjamin pasokan ikan baik untuk pasar konsumsi maupun ketersediaan bahan baku industri pengolahan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan strategi klasterisasi pelabuhan perikanan didasari aspek pengelolaan dan kelas pelabuhan perikanan. Pengelompokan pelabuhan perikanan berdasarkan aspek operasional dan distribusi hasil perikanan di wilayah Pesisir Jawa terbagi dalam tiga klaster dalam menunjang ketersediaan pasokan ikan pada Industri Perikanan. Pengelompokan tersebut didasarkan pada tingkat kesamaan antar aktivitas pelabuhan perikanan. Kebijakan sistem interaksi pelabuhan perikanan akan berimplikasi dengan sistem logistik perikanan. Terbentuknya sistem logistik perikanan diharapkan dapat mengatasi permasalahan kekurangan bahan baku industri perikanan, kelebihan pasokan dan penurunan mutu hasil tangkapan.

DAFTAR PUSTAKA

Gumilang, A. P. (2021). Analisis Distribusi Hasil Tangkapan Berdasarkan Aktivitas Pasar dan Pemasaran Pelabuhan Perikanan Jawa Tengah. *Barakuda 45: Jurnal Ilmu Perikanan Dan Kelautan*, 3(1), 28-35. <https://doi.org/10.47685/barakuda45.v3i1.168>

[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2013. Sistem Logistik Ikan Nasional Mulai di Garap. <http://www.kkp.go.id>

Lubis E, AB Pane; Y. Kurniawan; J. Chaussade; C. Lamberts; P. Portier. 2005. Atlas perikanan tangkap dan pelabuhan perikanan di pulau Jawa. Bogor (ID): Kerjasama antara PK2PTM- Institut Pertanian Bogor dengan Université de Nantes dan CNRS 6554-Nantes, France. 120 hlm.

Mai N, Bogason S, Arason S, Árnason S, Matthiasson T. 2010. Benefits of traceability in fish supply chains-case studies. *British Food Journal*. 112:976-1002.

Srinivasan UT. 2010. Food security implications of global marine catch losses due to overfishing. *Journal of Bioeconomics*. 12(3):183-200.

Supranto J. 2004. Analisis Multivariat Arti dan Interpretasi. Jakarta (ID): PT Rineka Cipta.

Zulham A, Saptanto S. 2012. Kesiapan program dan strategi pengembangan perikanan tangkap laut pada kawasan minapolitan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 1(1):65-76.